



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR : 05.1/ORT.06/9601/2023

TANGGAL : 05 JANUARI 2023

TAHUN 2023

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan KPU, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Aimas
Pada tanggal Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG



FRENGKI DUWITH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

NOMOR SOP	:	05.3/ORT.06/9601/2023
TGL. PEMBUATAN	:	05 Januari 2023
TGL. REVISI	:	
DISAHKAN OLEH	:	<p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG</p>  <p>FRENGKI DUWITH</p>
NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 2 tahun 2021 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum.

1. Mengetahui Tugas dan Fungsi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pemerintah;
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi tugas pada Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU ;
3. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer, Printer, Scanner;
2. Jaringan Internet;
3. Dokumen/Data pendukung.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Kelalaian menjalankan SOP dapat menghambat Kelancaran pelaksanaan tugas secara umum pada kantor KPU Kab. Sorong

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		SUB BAGIAN PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	PELAKSANA SUBAG HUKUM	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU							
1.	Menyusun Draft rancangan Peraturan KPU Kabupaten maupun Keputusan KPU Kabupaten				1. Komputer/Laptop 2. Buku petunjuk /Juknis / Referensi hukum	1 Jam	
2.	Meneliti konsep draft rancangan Peraturan KPU Kabupaten maupun Keputusan KPU Kabupaten				Buku petunjuk /Juknis / Referensi hukum	1 Jam	
3.	Menyusun konsep dan mengajukan kepada Sekretaris KPU				Buku petunjuk /Juknis / Referensi hukum	30 menit	
4.	Penandatanganan peraturan KPU maupun Keputusan KPU oleh Ketua KPU				Buku petunjuk /Juknis / Referensi hukum	10 menit	
5.	Penomoran peraturan KPU maupun Keputusan KPU				Naskah Asli dan Salinan Produk Hukum	5 menit	Naskah Asli dan Salinan Produk Hukum
6.	Pendistribusian Salinan peraturan KPU maupun Keputusan KPU				Salinan peraturan dan Keputusan	5 menit	Scan Produk Hukum
7.	Pengarsipan peraturan KPU maupun Keputusan KPU				Hard Copy dan Soft Copy	5 menit	Scan Produk Hukum